PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ERNA SULISTYOWATI**
2. Jabatan : **KEPALA KANWIL**
3. NHK : **135516**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 3.950.500.000

1. Tanah Seluas 578 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 450.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/158 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/45 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/45 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/80 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 659.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA 125 CC Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT 110 CC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI NINJA 250 CC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

4. MOTOR, HONDA VARIO 125 CC Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER/JEEP Tahun 2013, WARISAN Rp. 150.000.000
6. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**----**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**401.330.309**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**1.944.509.771**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**6.955.340.080**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**6.955.340.080**

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.